




Panduan Singkat Aksi Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi



Latar Belakang





Dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi, berbagai upaya dalam melakukan penindakan pelaku belum mampu untuk memberantas korupsi secara keseluruhan. Upaya-upaya yang melingkupi usaha pencegahan juga memiliki peran yang sangat penting dalam melengkapi peran dari berbagai upaya penindakan yang dilakukan. Upaya-upaya dalam mencegah dan memberantas korupsi yang dilakukan tidak hanya menjadi tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semata, namun juga memerlukan peran serta dari masyarakat. Hal inipun sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi yang harus melibatkan peran serta dari masyarakat. Berangkat dari amanat yang telah tertuang dalam Undang Undang, KPK ingin meningkatkan pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Pelibatan masyarakat harus bersifat inklusif dan memberdayakan, yang berarti harus melibatkan seluruh kelompok atau segmen masyarakat dan mendorong masyarakat untuk berperan

dalam pencegahan korupsi sesuai dengan fungsi dan bidang yang didalami.

Komunitas sebagai bagian dari masyarakat dipilih oleh KPK untuk menjadi mitra dalam upaya pencegahan korupsi karena diyakini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat dan bahkan mempengaruhi para pembuat kebijakan (pemerintah). Dengan alasan inilah KPK menginisiasi Aksi Pelibatan Komunitas dalam Pencegahan Korupsi dengan tujuan untuk melibatkan lebih banyak masyarakat yang semakin sadar akan urgensi isu korupsi dan berperan aktif dalam mencegah korupsi. Inisiatif Gerakan Pelibatan Komunitas KPK ke depannya diharapkan dapat menjangkau seluruh *stakeholder*. Gerakan pelibatan komunitas ini diharapkan mampu untuk menjadi suatu gerakan pelibatan komunitas yang membangun semangat kemandirian untuk memberdayakan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Gerakan pencegahan korupsi ini juga diharapkan mampu merangkul semua pihak dan berorientasi pada langkah kongkrit untuk menghasilkan solusi bagi permasalahan layanan publik.

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekilas Tentang Dikyanmas KPK

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Deputi Bidang Pencegahan

Direktorat
Pendaftaran &
Pemeriksaan
LHKPN

Direktorat
Gratifikasi

Direktorat
Pendidikan &
Pelayanan
Masyarakat

Direktorat
Penelitian dan
Pengembangan

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK adalah unsur pelaksana sebagian tugas pokok dari Deputi Bidang Pencegahan yang melaksanakan program pendidikan anti korupsi, sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi di lembaga negara, pemerintah, institusi, Pihak Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum.

Rekam Jejak KPK dalam Komunitas

Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan dengan penindakan pelaku korupsi, akan tetapi tindakan preventif juga dapat dilakukan melalui pendidikan anti korupsi maupun peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik. Setidaknya, terdapat tiga *stakeholder* utama yang perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan korupsi agar mampu menghasilkan dampak yang riil. Ketiga *stakeholder* tersebut adalah masyarakat sebagai pihak penerima manfaat paling akhir, komunitas sebagai penggerak perubahan dan pemerintah sebagai pihak yang menjalankan mandat rakyat. Ketiga *stakeholder* ini memegang peranan yang krusial dan saling interdependen dalam menyelesaikan upaya pencegahan korupsi.

Sejak Maret 2016, KPK telah aktif melakukan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi publik dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik untuk

pencegahan korupsi serta menumbuhkan semangat anti korupsi di tengah masyarakat melalui serangkaian pertemuan, forum, kegiatan dan program dengan beberapa mitra komunitas dan pemerintah daerah guna memfasilitasi keterlibatan komunitas dalam pencegahan korupsi.

Inisiatif awalan ini dilakukan di 5 (lima) daerah yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten dan Bali. Di tahun 2017, KPK menginisiasi pembentukan Forum Bersama antara komunitas dan Pemerintah Daerah di Provinsi Riau yang dinamakan Forum Marwah (Masyarakat Riau Anti Rasuah) sebagai gerakan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan transparansi. Selain itu, dalam upaya menjaga semangat anti korupsi, KPK juga meninggalkan jejak di Aceh melalui kegiatan Anti Corruption Youth Camp dan kampanye unik "Jujur Baren-gan" yang dilahirkan bersama puluhan komunitas di Yogyakarta.

Sekilas Tentang Gerakan Pelibatan Komunitas Untuk Pencegahan Korupsi

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi



Jejak KPK Dalam Komunitas - Provinsi Riau

Sumber: Laporan Peta Jalan Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat Di Provinsi Riau: Mendorong Perbaikan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Dana Desa Dan Lingkungan Hidup Kehutanan (Forum Marwah Provinsi Riau, 2017)

Provinsi Riau bersama dengan KPK dan komunitas dalam kolaborasi Forum Marwah Provinsi Riau berhasil menyusun Peta Jalan Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat. Terpilihnya Provinsi Riau dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Riau sebagai satu dari tiga daerah yang rawan dengan korupsi. Penetapan Riau sebagai daerah rawan korupsi juga menjadi latar belakang KPK dalam memilih Riau sebagai daerah prioritas pendampingan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah, khususnya dalam isu pelayanan publik.

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan dengan melibatkan komunitas yang ada di Riau. Pelibatan komunitas yang dilakukan diwujudkan dalam pembentukan Forum MARWAH (Masyarakat Riau Anti Rasuah) yang terdiri atas pemerintah daerah Prov. Riau dan komunitas yang berfokus pada isu anti korupsi dalam pemberian layanan publik, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan dana desa. Komunitas memiliki peran strategis dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan rencana aksi partisipasi publik dalam pencegahan korupsi. Komunitas juga memiliki kapabilitas dalam melakukan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dalam mencegah korupsi. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya antara komunitas dan pemerintah daerah yang selama ini memiliki sudut pandang berbeda dalam melihat dan menyelesaikan masalah. Komunitas melihat pemerintah sebagai pihak yang harus selalu diawasi, sedangkan pemerintah beranggapan bahwa segala sesuatu yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku.

Untuk mengakomodasi kepedulian masyarakat pada isu korupsi dalam pemberian layanan publik, KPK menginisiasi untuk disusunnya sebuah *road map* pencegahan korupsi dalam pelayanan publik yang berbasis masyarakat. Dalam penyusunannya pun masyarakat didorong untuk terlibat secara aktif. Walaupun peta jalan yang disusun telah difokuskan untuk mengawasi dan mengawal pemberian layanan publik dalam isu pendidikan, kesehatan, dan dana desa, kerangka dan tahapan pelibatan partisipasi publik dalam penyusunan peta jalan tersebut diharapkan mampu digunakan dan diadaptasi dalam berbagai konteks atau isu dan jenjang pemerintahan.



Jejak KPK Dalam Komunitas - Sekolah Pemuda Desa 2017

Sumber: Laporan Sekolah Pemuda Desa: Energi Muda Desa Untuk Negeri (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017)

"Energi Muda Desa Untuk Negeri" merupakan jargon yang terbentuk dari pelaksanaan kegiatan Anti Corruption Youthcamp 2016 yang diselenggarakan di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Jargon tersebut lahir dari hasil diskusi antara Komunitas dan KPK untuk menjawab konsep kegiatan yang ingin dilaksanakan dalam rangka mendorong generasi muda, terutama terhadap generasi muda yang ada di desa atas kontribusi mereka untuk memajukan desa di lingkungannya. Generasi muda dipercaya memiliki peranan yang penting dalam membawa perubahan di lingkungan sosial karena kuat dan cepatnya respon yang diberikan atas isu-isu sosial yang terjadi.

Pembangunan Desa saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Desa diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan melibatkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh generasi muda, KPK mengajak pemuda desa untuk terlibat secara aktif di desanya melalui pengawalan penggunaan dana desa dan pengelolaan dana desa, bersama-sama dengan aparat desa. Sekolah Pemuda Desa yang dilaksanakan pada 24-26 November 2017 di Yogyakarta merupakan perwujudan semangat KPK dan komunitas untuk mengajak dan mengedukasi pemuda agar mengenal serta memahami nilai-nilai antikorupsi dan bergerak untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diikuti oleh 60 perwakilan pemuda dari 20 desa terpilih di wilayah Yogyakarta. Sekolah Pemuda Desa juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberdayakan pemuda desa agar mau dan mampu berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan Sekolah Pemuda Desa, KPK turut melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi pemerintahan maupun masyarakat, antara lain: Ketijl Bergerak, Angkatan Perubahan, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Jejak KPK Dalam Komunitas - Nahdlatul Ulama

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi berbasis keagamaan terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya manusia yang besar. Walaupun organisasi ini didirikan dengan landasan agama, hal ini tidak menyurutkan niat koruptor untuk menjadikan pesantren NU sebagai sasaran untuk membangun citra baik dibalik bantuan sosial yang diberikan. Natur dari pesantren yang selalu berprasangka baik dimanfaatkan oleh koruptor untuk mengucurkan dana dengan jumlah besar dengan kedok sebagai bantuan, yang sebenarnya mengindikasikan tindakan korupsi. Pemberian bantuan sosial yang banyak dikucurkan ke banyak pesantren menjadi target dilakukannya praktek-praktek korupsi "kickback", "pemerasan", maupun "trading influence".

Berangkat dari peristiwa tersebut, Lakpesdam PBNU mulai melakukan sebuah gerakan untuk melindungi pesantren dari jebakan koruptor dibalik dana besar yang diberikan. Gerakan ini dimulai dengan penulisan buku dengan judul "Jihad NU Melawan Korupsi". Bedah buku yang dilakukan di berbagai daerah dimanfaatkan oleh NU untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi anti korupsi dalam internal NU sendiri.

Dalam rangka memperkuat gerakan yang dilakukan NU, KPK melakukan pemberdayaan komunitas dengan memberikan peningkatan kapasitas kepada organisasi NU agar dapat lebih memahami modus praktik-praktik korupsi. Peningkatan kompetensi juga dilakukan KPK terhadap para Kyai dan Pengurus Pesantren dalam mengelola keuangan organisasi mereka. KPK juga mengadakan Training of Trainer untuk Penggerak NU Anti Korupsi. Selain itu KPK juga melakukan peningkatan kapasitas melalui Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK) dengan memasukkan nilai-nilai anti korupsi di dalamnya. Kegiatan ini dilakukan pada Oktober 2017 lalu dengan melibatkan 41 orang perwakilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).



Jejak KPK Dalam Komunitas-Seni Memberantas Korupsi: Festival Antikorupsi Komunitas

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017

KPK memiliki cita-cita mulia untuk menciptakan Negara Indonesia yang bersih dari korupsi. Dari dulu hingga sekarang, KPK memandang masyarakat sebagai *stakeholders* penting yang memiliki jangkauan dan kekuatan besar, sehingga KPK tidak pernah berhenti mengajak masyarakat agar terlibat aktif dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi. Pada tahun 2017, KPK, bekerjasama dengan pemerintah Kota Denpasar dan komunitas lokal untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan antikorupsi. Rangkaian kegiatan ini dimulai pada tanggal 11 September 2017 dengan kegiatan *Anticorruption Messengers Bali* 2017, dimana ada 9 tim dari SAMAS BALI (komunitas pesepeda lokal) bersepeda ke seluruh kabupaten di Bali dengan membawa maklumat anti korupsi lalu menyerahkan maklumat tersebut untuk dibacakan oleh Bupati setempat, sebagai bentuk komitmen sekaligus pembukaan keseluruhan rangkaian Festival Antikorupsi 2017.

Rangkaian kegiatan melibatkan 18 komunitas yang ada di Bali. Berbagai kegiatan seperti pembuatan mural, melukis kartun, pembuatan mini album, klinik pembuatan film dan seminar berhasil dilaksanakan secara sukses. KPK menyadari bahwa seni dan budaya merupakan instrument yang kuat yang dapat digunakan untuk melawan korupsi melalui peningkatan rasa empati masyarakat terhadap dampak negatif yang timbul dari korupsi.

Rangkaian kegiatan ini tidak akan terhenti di hari festival berlangsung, karena di tahun 2018, rangkaian masih akan dilanjutkan dengan kegiatan Banjar to Banjar. Lewat kegiatan ini, KPK mendorong pemuda desa adat (yang sangat majemuk di Bali) untuk berkontribusi dan mengawasi penggunaan dana desa dengan cara inovatif mereka sendiri. KPK berharap bahwa kerjasama yang erat Antara antara KPK, pemerintah, dan komunitas-komunitas lokal ini akan terus berlanjut di tahun-tahun ke depan





Jejak KPK Dalam Komunitas- Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

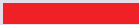
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018

Provinsi Banten bersama dengan KPK berhasil menyusun Aksi Kolaborasi Bersama Dalam Pencegahan Korupsi. Dua Kabupaten terpilih sebagai bagian dari program awal, yakni Lebak dan Pandeglang. Bukan tanpa alasan, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang terpilih karena dua kabupaten ini termasuk ke dalam daftar Kabupaten Tertinggal, sehingga dirasa perlu untuk diberi perhatian lebih, khususnya dalam isu pelayanan publik dasar, yakni kesehatan, pendidikan, dan dana desa.

Usaha pencegahan korupsi ini melibatkan komunitas dan pemerintah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial. Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, dipilih karena merekalah yang berkaitan erat dengan isu-isu di atas, sementara Dinas Sosial dipilih karena data semua penerima manfaat layanan bersumber dari data Dinas Sosial. Maka, di Pandeglang terbentuklah Forum Limasakti (Lintas Masyarakat Anti Korupsi), sementara di Lebak terbentuk Forum Kompak (Koalisi Masyarakat Peduli Anti Korupsi). Forum-forum ini terdiri dari komunitas-komunitas dan OPD dengan jumlah yang dirasa sudah proporsional. Forum ini juga diharapkan dapat meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, yang diwakili oleh Komunitas dan OPD.

Pada tanggal 7 hingga 9 September 2018, kedua tim ini turun ke lapangan untuk melakukan observasi, survei, FGD, dan sosialisasi di 6 desa terpilih; 3 di Pandeglang dan 3 di Lebak. Para perwakilan OPD dan komunitas yang ada di dalam forum harus berkolaborasi dengan baik agar tujuan dari program ini dapat tercapai. Semua masalah yang ditemukan di tengah masyarakat nantinya akan diolah kembali untuk dijadikan rekomendasi yang akan diberikan kepada Bupati masing-masing Kabupaten. Nantinya, rekomendasi ini diharapkan dapat mendorong perbaikan layanan publik dasar, karena bagaimanapun, korupsi itu dianggap sudah tidak ada lagi ketika masyarakat sudah menerima haknya secara optimal. Ketika masyarakat dapat berobat dengan tuntas, ketika anak-anak dapat bersekolah hingga lulus SMA, ketika desa menjadi mandiri dengan dana desa, saat itulah, korupsi lenyap.

Konsep Dasar Dalam Pelibatan *Stakeholder*



Kolaborasi antara komunitas dan pemerintah membawa dampak besar bagi masyarakat. Komunitas memiliki kedekatan dan *influence power* yang besar bagi masyarakat dan pemerintah memiliki sumber daya serta kewenangan dalam perumusan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam rangka membina hubungan yang produktif, penting untuk memahami konsep strategi pelibatan.

Dalam proses mengajak komunitas dan pemerintah daerah untuk bekerjasama, KPK menggunakan tiga konsep dasar untuk memulai, menjaga dan membangun hubungan dengan *stakeholder* terkait. Ketiga konsep dasar tersebut adalah:



Get

Langkah pertama dalam mengajak kerjasama adalah memahami bahwa masing-masing pihak memiliki karakter, keinginan dan cara pandang yang berbeda. Ketika memulai pendekatan, penting untuk menggunakan langkah yang sesuai dengan karakter pihak yang dituju.



Keep

Langkah kedua adalah menjaga hubungan yang telah terbentuk dengan melakukan interaksi yang berkala dan menjaga komitmen dari masing-masing pihak.

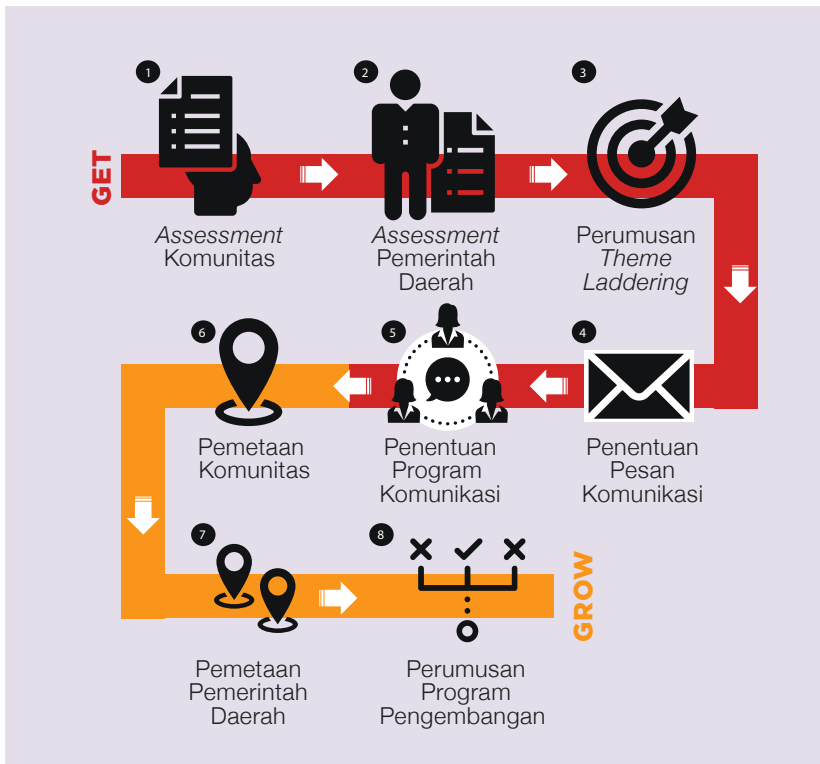


Grow

Langkah ketiga adalah mengembangkan hubungan yang sudah dibina dengan menghasilkan simbiosis mutualisme dan saling meningkatkan kapasitas masing-masing pihak.

Langkah-langkah Pelibatan Komunitas

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat merancang langkah-langkah yang efektif dan efisien dalam melakukan Gerakan Pelibatan Komunitas.



Tujuan Assessment Komunitas



Value Fit

Bertujuan untuk melihat sejauh mana komunitas memiliki kecocokan nilai, tujuan dan identitas dengan KPK, sehingga dapat menunjukkan representasi karakter yang sesuai dengan karakter KPK.



Persepsi & Ekspektasi terhadap KPK

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunitas memandang KPK dan peran seperti apa yang diharapkan dijalankan oleh KPK.



Persepsi & Ekspektasi terhadap Pemda

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunitas memandang pemerintah daerah dan peran seperti apa yang diharapkan dijalankan oleh pemerintah daerah.



Tingkat Kedekatan dengan Pemda

Bertujuan untuk mengukur tingkat kedekatan dan interaksi komunitas dengan pemerintah daerah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi hubungan keduanya.



Tingkat Keterlibatan dalam Isu Korupsi

Bertujuan untuk mengukur tingkat keterlibatan atau potensi keterlibatan komunitas dengan isu pencegahan korupsi, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai potensi segmen untuk mengemban misi KPK.

Assessment komunitas dilakukan dengan menilai 3 hal, yaitu kecocokan nilai antara komunitas dan KPK, persepsi, dan ekspektasi komunitas terhadap KPK dan pemerintah daerah.

Konsep Komunikasi & Pengembangan Komunitas

Berikut ini adalah *key ingredients* yang harus mendasari penyusunan program komunikasi dan program pengembangan komunitas oleh KPK.

Connect

Ciptakan konten yang menarik perhatian dan menstimulasi partisipasi.

Corporate

Susun kegiatan yang memungkinkan *stakeholder* untuk berkontribusi sesuai dengan fungsi masing-masing.

GET

Key ingredients dalam strategi komunikasi untuk mengajak komunitas bergabung dalam gerakan pelibatan komunitas.

Collaborate

Susun program/agenda menitikberatkan agenda bersama.

Cultivate

Ciptakan program pengembangan yang dapat meningkatkan *skill, knowledge* dan *networking*.

GROW

Key ingredients dalam program pemberdayaan bagi komunitas

Sumber: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers (Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, 2010)

Langkah Taktis Menjalin Hubungan Dengan Pemerintah



1.

Sebelum memulai interaksi, pahami bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tata cara kerja (*code of conduct*) komunitas dan pemerintah. Komunitas memiliki keleluasan dalam mengambil keputusan dalam waktu cepat, sedangkan pemerintah diatur oleh prosedur administrasi. Oleh karena itu, penting bagi komunitas untuk memahami perbedaan mendasar untuk memperlancar proses sinergi dan kerjasama.



2.

Ketika memulai dialog, pahami bahwa masing-masing pihak memiliki persepsi, cara pandang, pendapat yang berbeda terhadap satu permasalahan. Penting sekali untuk menyampaikan secara jelas *stance point* masing-masing dan mencoba memahami menggunakan kacamata satu sama lain agar proses dialog berjalan lancar.



3.

Jika terdapat perbedaan cara pandang yang signifikan, gunakan teknik *soft approach* dalam bernegosiasi untuk menemukan titik tengah. Penggunaan *soft approach* membantu masing-masing pihak menjaga rasionalitas dalam berdiskusi.



4.

Dalam menjaga hubungan yang telah terbina, penting untuk menjaga komunikasi secara berkala. Komunikasi tidak harus dilakukan dalam forum formal dan membahas topik formal, berkomunikasi informal dan menggunakan *personal approach* (pendekatan pribadi) juga penting untuk dilakukan.



5.

Setiap isu yang diadvokasi, penting untuk melakukan *regular follow up* untuk memastikan tingkat komitmen dalam menyelesaikan permasalahan tetap terjaga, sehingga dapat membuahkan hasil.

Langkah Taktis Menjalin Hubungan Dengan Komunitas



1.

Memahami bahwa setiap komunitas dapat memiliki karakter yang berbeda dan menginternalisasi nilai-nilai yang berbeda pula, sesuai dengan fokus isu dan bidang komunitas.



2.

Tidak ragu untuk memulai komunikasi awal dengan komunitas dengan menyasar kepada *key opinion leader* (orang yang berpengaruh) dalam komunitas tersebut.



3.

Lakukan pertemuan rutin dan konsisten dengan komunitas untuk memperkuat komunikasi dan interaksi yang sudah dilakukan. Komunikasi yang dilakukan tidak harus dalam bentuk komunikasi yang formal.



4.

Mulai merencanakan dan melakukan gerakan atau kegiatan kolaborasi untuk meningkatkan intensitas interaksi dan meningkatkan *trust* serta partisipasi, dari komunitas secara khusus dan masyarakat secara umum.



5.

Melibatkan komunitas dalam penyusunan program atau kebijakan pemerintah, sehingga program dan kebijakan yang disusun dapat tepat sasaran, sekaligus mengembangkan kapasitas komunitas dan masyarakat dalam *problem solving*.

